

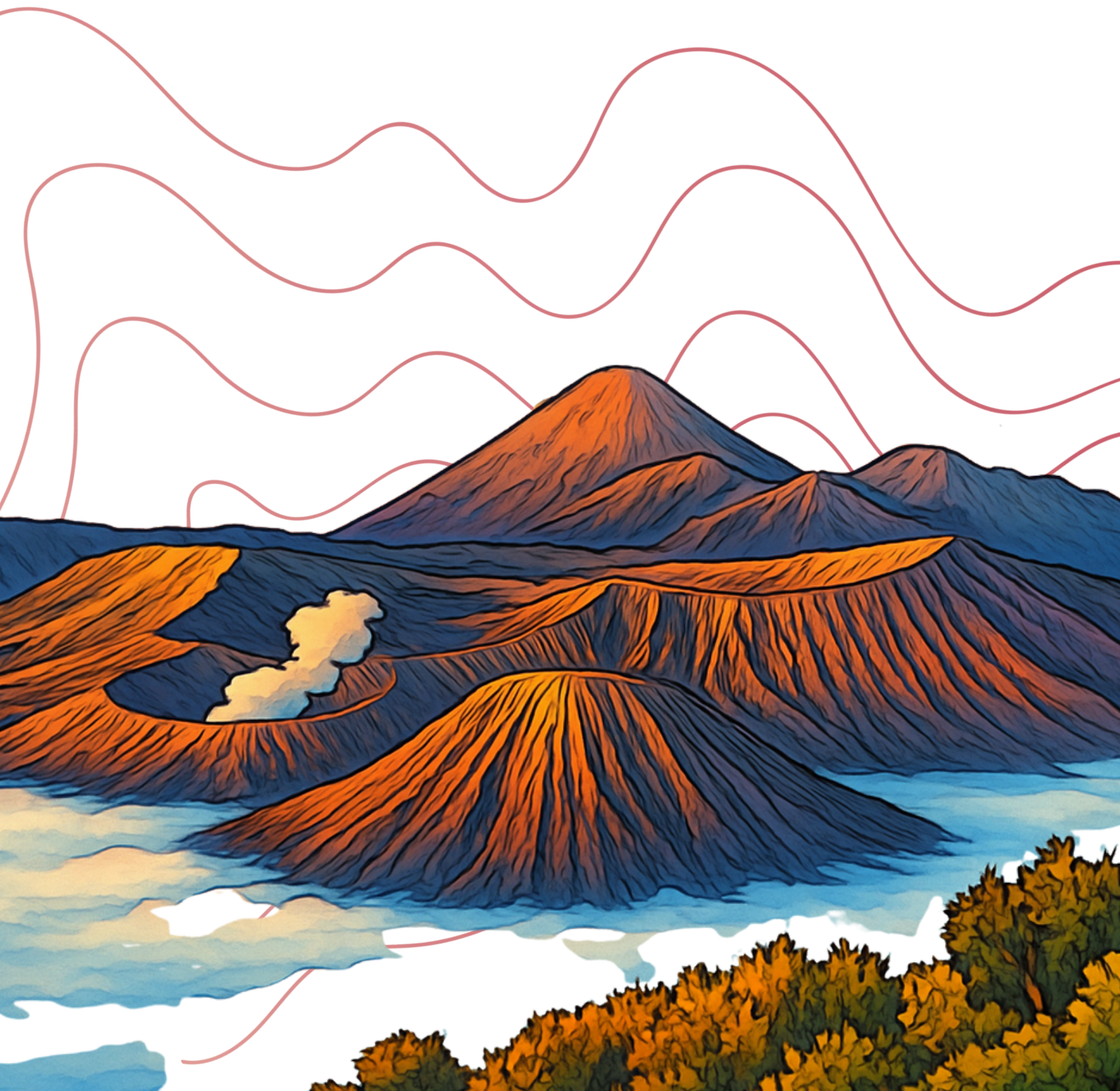


**DJKN**

**KPKNL**  
MALANG MBOIS

# LAPORAN KINERJA KPKNL MALANG

TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta’ala. Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan waktu dan kesehatan, dimana sepanjang tahun 2025 kita menghadapi tantangan berat, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan tuntutan pemangku kepentingan yang terus meningkat, namun seluruh jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang masih diberikan kesempatan memberikan karya terbaik atas capaian kinerjanya sekaligus masih diberikan kepercayaan meraih berbagai penghargaan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. KPKNL Malang sebagai Instansi Vertikal DJKN telah menyusun LKj yang berisi berbagai capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025.

*Performance* KPKNL Malang dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Malang dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025. Pengukuran kinerja Tahun 2025 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 diperoleh rata-rata capaian IKU *Kemenkeu Three* KPKNL Malang Tahun 2025 sebesar 118,90%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Malang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Malang Tahun 2025.

Di samping itu, melalui LKj yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Malang untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. LKj KPKNL Malang Tahun 2025 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media

pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran KPKNL Malang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.

Sebagai simpulan atas semua hal tersebut, kami yakin meski tantangan ke depan semakin beragam dan sulit terprediksi, namun dengan semangat, sinergi, dan disiplin tinggi, KPKNL Malang akan menjadi lebih baik sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Keseluruhan pencapaian tentu saja tidak lepas dari arahan Pimpinan, peran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan, dimana kata syukur dan terimakasih tidak dapat mewakili andil tersebut, semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dapat memberikan balasan yang lebih baik dan keberkahan atas segala upaya yang telah tercurah selama ini.

Salam MBOIS,



Ditandatangani secara elektronik  
Kurniawan Catur Andrianto

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan sebagian tugas Menteri Keuangan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPKNL Malang tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja KPKNL Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2025 dijabarkan dalam melalui 8 Sasaran Strategis dan 18 IKU. Adapun sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utamanya yang harus dicapai tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dengan Kanwil Jawa Timur. Status capaian IKU Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tahun 2025 adalah **116,43% (hijau)**.

Dengan capaian IKU tersebut KPKNL Malang ditetapkan sebagai Satker dengan NKO tertinggi di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur Tahun 2025.

Pada bidang Pelaksanaan Anggaran, KPKNL Malang mendapatkan apresiasi sebagai : Peringkat I Terbaik Satuan Kerja dengan pagu s.d 5 Milyar untuk Periode Triwulan II 2025, serta Peringkat II dengan kategori Digipay Satu Terbaik 2025 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang.

Pada bidang Penilaian dan Lelang, KPKNL Malang meraih penghargaan **Lencana Hakaryo Guno Mamayu Bawono Perak** sebagai Instansi yang berdedikasi dan berkontribusi sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan penilaian dan lelang dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kota Batu, pada 15 Oktober 2025.

Pada bidang Piutang, KPKNL Malang memperoleh penghargaan dari LPDP KUMKM atas penyelesaian pengurusan piutang negara.

Selain itu KPKNL Malang juga mengembangkan inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada para pemangku kepentingan, berupa :

1. OSKAB NEWS (Obrolan Seputar Kekayaan Negara Bermanfaat)
2. CAK MBOIS (Capaian Kinerja MBOIS)
3. Percepatan Penyelesaian Antrian Lelang
4. Percepatanan Layanan Pembayaran BPHTB

Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Malang tahun 2025 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

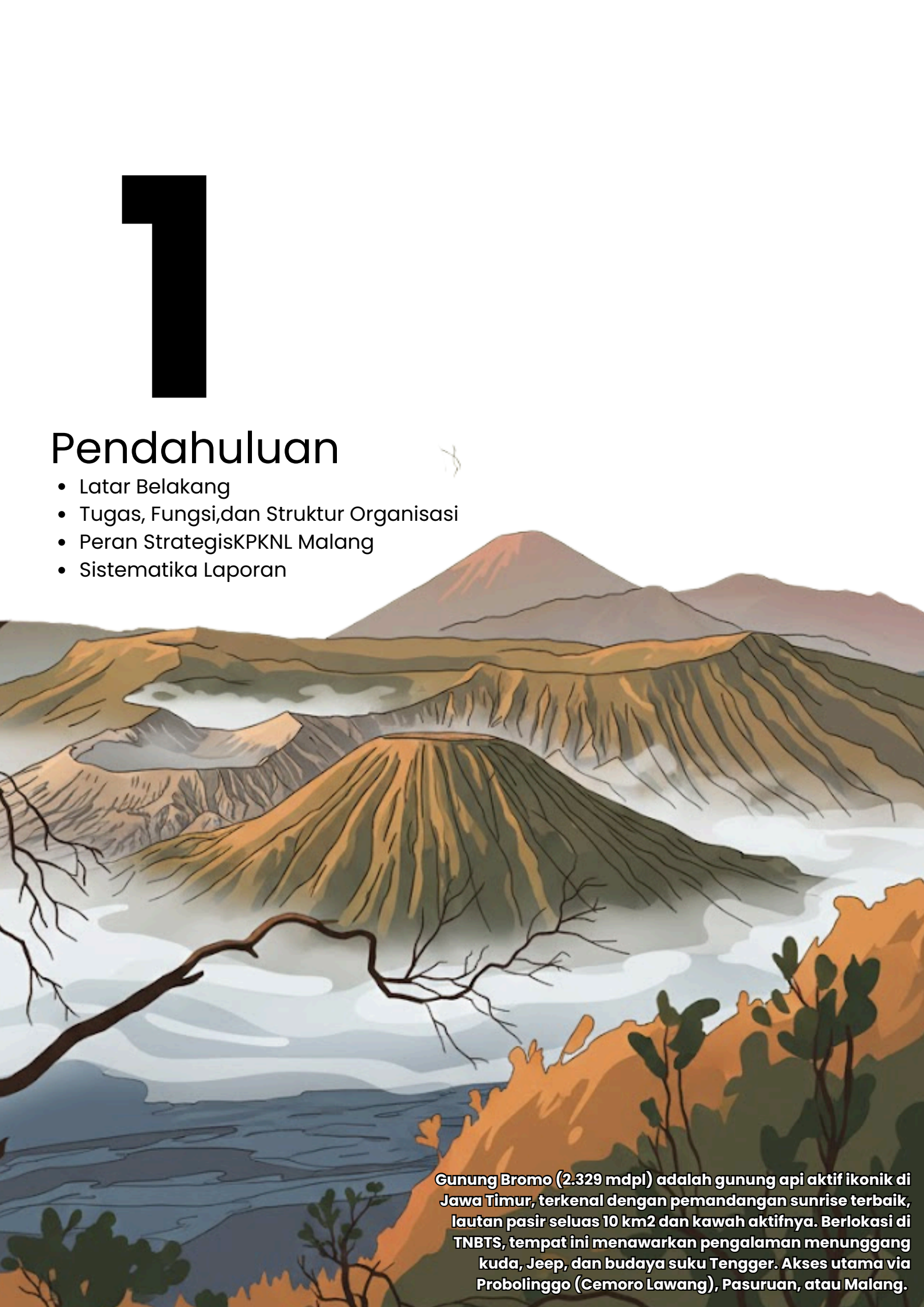
## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
C. Peran Strategis KPKNL Malang .....	8
D. Sistematika Laporan .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
A. Perencanaan Strategis .....	13
B. Penetapan Kinerja .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	20
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya .....	20
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal .....	22
Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa .....	24
Sasaran Strategis 4: Penetapan Tata Kelola Aset Yang Efektif .....	25
Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif .....	27
Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif .....	29
Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang efektif .....	31
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif .....	32
C. Realisasi Anggaran .....	34
D. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	35
D. Penghargaan dan Inovasi .....	36
BAB IV PENUTUP .....	39
LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA	
LAMPIRAN II FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	

# 1

## Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Peran Strategis KPKNL Malang
- Sistematika Laporan



Gunung Bromo (2.329 mdpl) adalah gunung api aktif ikonik di Jawa Timur, terkenal dengan pemandangan sunrise terbaik, lautan pasir seluas 10 km<sup>2</sup> dan kawah aktifnya. Berlokasi di TNBTS, tempat ini menawarkan pengalaman menunggang kuda, Jeep, dan budaya suku Tengger. Akses utama via Probolinggo (Cemoro Lawang), Pasuruan, atau Malang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Malang dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. KPKNL Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157, Kec. Sukun, Kota Malang, Kode Pos 65148.

KPKNL Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Pelayanan Lelang;
- d. Seksi Piutang Negara ;
- e. Seksi Pelayanan Penilaian;
- f. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- g. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Subbagian Umum**

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

## **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara.

## **Seksi Pelayanan Penilaian**

mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

## **Seksi Piutang Negara**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

## **Seksi Pelayanan Lelang**

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

## **Seksi Hukum dan Informasi**

mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

## **Seksi Kepatuhan Internal**

mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Jabatan Fungsional Pelelang**

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.

### **2. Jabatan Fungsional Penilai**

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN**

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang Milik Negara

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan PH dan atau Penjamin Hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lainnya;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL Malang.

Struktur organisasi **KPKNL Malang** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

## BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG



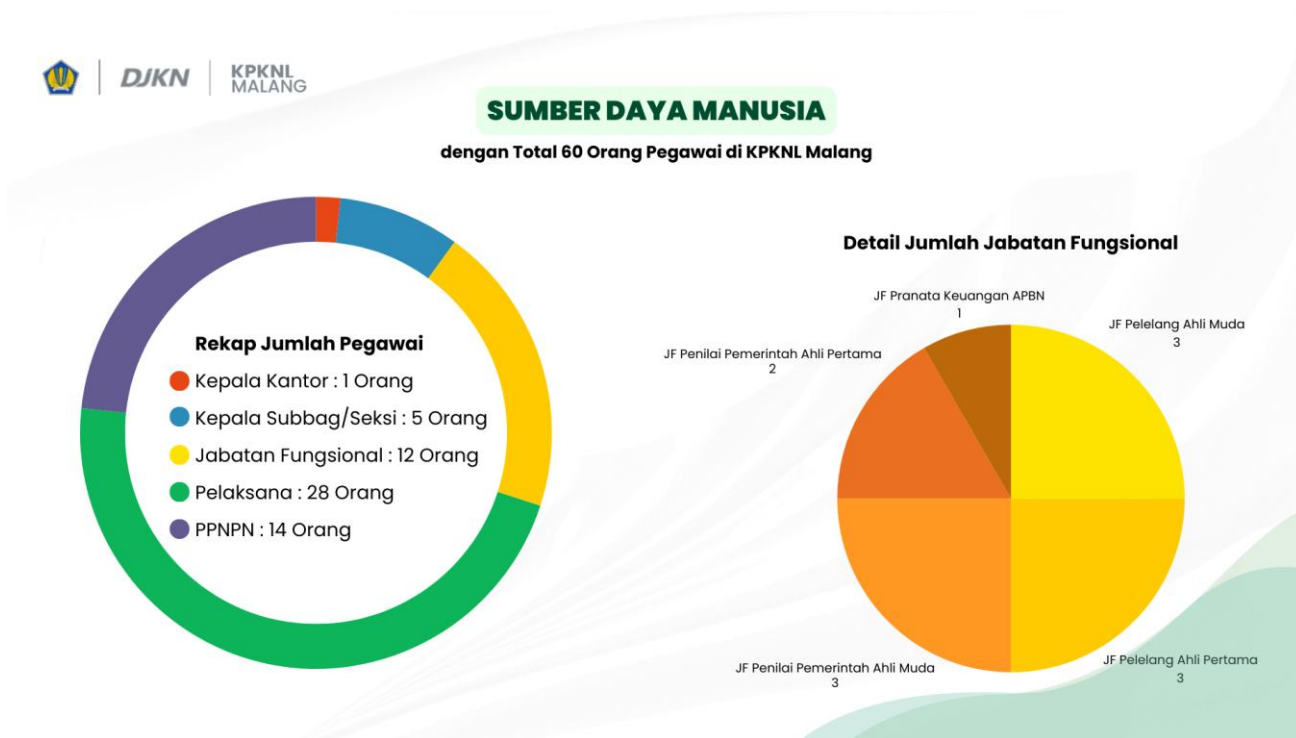
Sumber : PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016

Wilayah kerja KPKNL Malang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:

1. Kota Malang;
2. Kabupaten Malang;
3. Kota Batu;
4. Kota Kediri;
5. Kabupaten Kediri;
6. Kota Blitar;
7. Kabupaten Blitar;
8. Kabupaten Jombang;
9. Kabupaten Tulungagung;
10. Kabupaten Trenggalek;

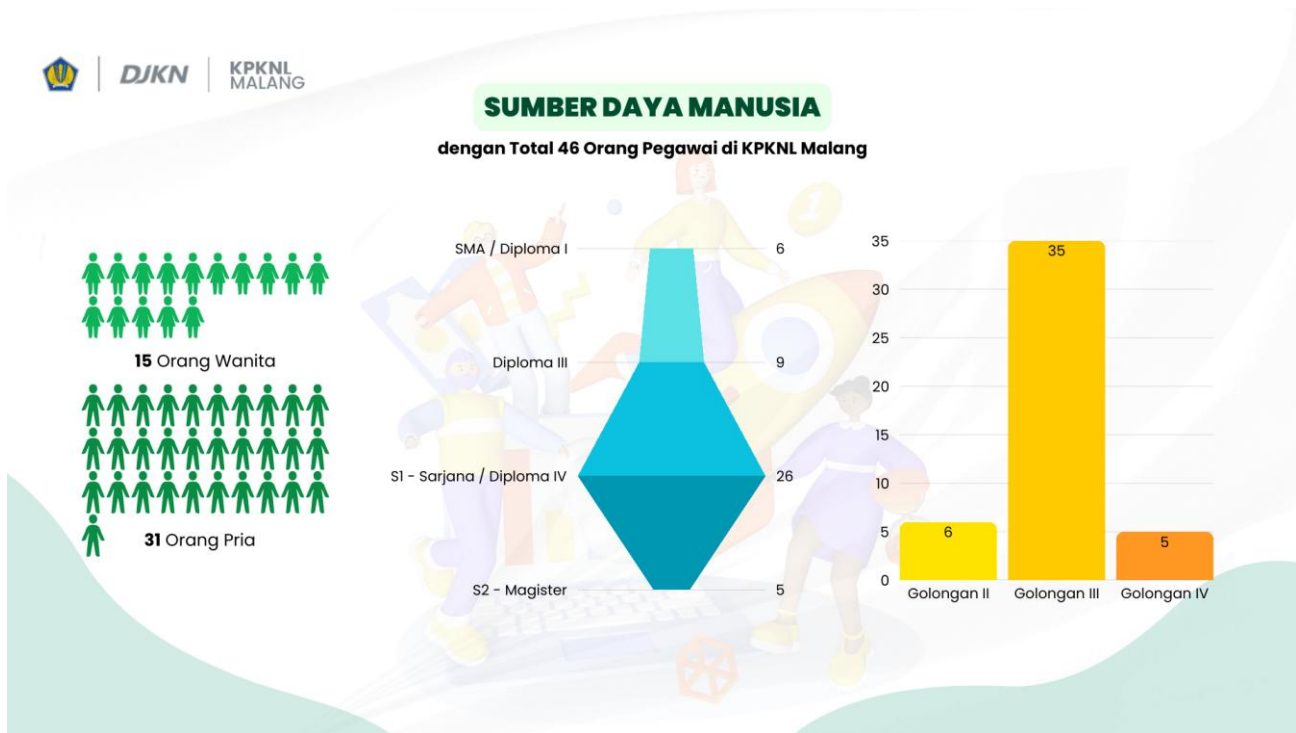
Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Malang didukung oleh 46 (empat puluh enam) orang pegawai ditambah 14 (empat belas) orang tenaga PPNPN, dengan komposisi pegawai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional



\*Data per 31 Desember 2025

2. Berdasarkan Gender, Pendidikan dan Golongan :



\*Data per 31 Desember 2025

## C. PERAN STRATEGIS KPKNL MALANG

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Malang memiliki peran strategis sebagai berikut :

### a. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Malang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Malang senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Malang dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akuntabel.

## **Pengukuran Penggunaan BMN sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan**

Salah satu bentuk pengelolaan BMN yang baik adalah penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang efektif dan efisien. Salah satu tools pengukuran tingkat keefektifan dan efisiensi penggunaan BMN adalah menggunakan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Pelaksanaan pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

## **Sertifikasi BMN berupa Tanah**

Dalam rangka mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) BMN berupa tanah, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi terhadap BMN berupa tanah yang belum bersertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan program ini KPKNL bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja dengan dukungan Satuan Kerja untuk proses penerbitan sertipikat hak pakai.

## **Utilisasi Aset**

Dalam pengelolaan BMN, hal yang paling utama adalah memastikan bahwa aset yang dikelola telah terutilisasi sesuai peruntukannya. Peran Pengelola sangat vital dalam memberikan penetapan status penggunaan BMN sebagai dasar Kuasa Pengguna Barang menggunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

## **Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Salah satu perubahan mendasar pada sektor pengelolaan aset Negara adalah pergeseran pola pikir dan sudut pandang. Jika sebelumnya BMN cenderung dipandang dan diperlakukan sebagai suatu beban (*cost center*), kini menjadi suatu investasi yang strategis dalam menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan sekaligus sebagai salah satu faktor sumber penerimaan pendapatan (*revenue center*).

Portofolio BMN yang sangat besar tentu harus dikelola dan diukur kinerjanya dengan baik dan optimal. Dengan adanya pengukuran kinerja aset ini diharapkan dapat merubah paradigma Pengelola BMN dari *asset administrator* menjadi *asset manager*. Evaluasi kinerja aset dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengukur/mengetahui kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

**b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center***

Penerimaan negara bukan pajak menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN, KPKNL sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset sehingga mengubah paradigma *cost center* menjadi *revenue center*.

**c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara**

Melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 dan KPKNL melaksanakan pengurusan piutang negara dengan nilai penyerahan diatas Rp8.000.000,00.

Selanjutnya, KPKNL Malang juga melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30//2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

**d. Memberikan Pelayanan Lelang**

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Malang secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli (*acte van transport*) untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Malang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

**e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara**

Dalam pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Malang memperoleh PNBP berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

Sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Malang memperoleh bea lelang (bea permohonan lelang, bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual, bea lelang batal, serta bea lelang pegadaian) termasuk Uang Jaminan Lelang dari Pembeli Wanprestasi yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Malang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) atau persetujuan pemindahtanganan/penjualan.

## D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja **KPKNL Malang** Tahun 2025 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah- langkah antisipatif yang diambil.

### 2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Malang serta sistematika laporan.

### 3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

### 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Malang tahun 2024.

### 5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Malang di tahun yang akan datang.

Sebagai pedoman dan motivasi bagi pegawai, KPKNL Malang membuat *Motto* yaitu **MBOIS** (**M**aju untuk memberikan layanan terbaik, **B**Onafive dengan layanan yang terpercaya, dan **I**Stimewa bagi seluruh pengguna layanan).

# 2

## PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Penetapan Kinerja



Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi, Gunung ini mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah  $\pm$  800 meter (utara-selatan) dan  $\pm$  600 meter (timur-barat), sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden, KPKNL Malang berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, yaitu:

#### **VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta Roadmap DJKN to *distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

#### **MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## **TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

## **SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif.

## B. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2025 dijabarkan dalam melalui 8 Sasaran Strategis dan 19 IKU sebagai berikut :

- 1 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya**
  - IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 105,29%
  - IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 113,55%
- 2 SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**
  - IKU : Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara tercapai sebesar 120,00%
  - IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 120,00%
  - IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 120,00%
- 3 SS : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**
  - IKU : Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi tercapai sebesar 120,00%
  - IKU : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tercapai sebesar 120,00%
- 4 SS : Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif**
  - IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan tercapai sebesar 120,00%
  - IKU : Persentase Evaluasi Kinerja BMN tercapai sebesar 120,00%
- 5 SS : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif**
  - IKU : Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 120,00%
  - IKU : Tingkat Kualitas Layanan Penilaian tercapai sebesar 120,00%
  - IKU : Persentase Produktivitas Lelang tercapai sebesar 120,00%
- 6 SS : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif**
  - IKU : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai sebesar 120,00%

- IKU : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai sebesar 120,00%
- 7 SS : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif**
- IKU : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tercapai sebesar 115,00%
- IKU : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tercapai sebesar 120,00%
- 8 SS : Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif**
- IKU : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tercapai sebesar 120,00%
- IKU : Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM tercapai sebesar 120,00%

# PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL MALANG

TAHUN 2025

## NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL MALANG PERIODE s.d. BULAN DESEMBER TAHUN 2025

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100	105,29	19%	33,00%	57,58%	105,29%	105,29%	Hijau
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	47.203.500.000,00	53.597.985.388,00	14%	33,00%	42,42%	113,55%	113,55%	Hijau
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	P/M	100,00%	122,22%	14%	42,00%	33,33%	122,22%	120,00%	Hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	380.000.000.000,00	Rp505.060.550.161,00	14%	42,00%	33,33%	132,91%	120,00%	Hijau
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	2.642.557.000,00	Rp7.282.183.937,00	14%	42,00%	33,33%	275,57%	120,00%	Hijau
3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	74	98,96	14%	28,00%	50,00%	133,73%	120,00%	Hijau
3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	P/M	77	96,20	14%	28,00%	50,00%	124,94%	120,00%	Hijau
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/M	100,00%	125,00%	14%	28,00%	50,00%	125,00%	120,00%	Hijau
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	P/M	100,00%	123,99%	14%	28,00%	50,00%	123,99%	120,00%	Hijau
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	37,70	48,90	14%	42,00%	33,33%	129,71%	120,00%	Hijau
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	P/M	70%	107,00%	14%	42,00%	33,33%	152,86%	120,00%	Hijau
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80,00%	120,00%	14%	42,00%	33,33%	150,00%	120,00%	Hijau
6a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	120,00	14%	42,00%	33,33%	120,00%	120,00%	Hijau
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	P/M	100	120,00	14%	42,00%	33,33%	120,00%	120,00%	Hijau
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	80,00%	98,91%	14%	42,00%	33,33%	123,64%	120,00%	Hijau
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	P/M	100	115,00	14%	28,00%	50,00%	115,00%	115,00%	Hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	110,00	14%	28,00%	50,00%	137,50%	120,00%	Hijau
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	80	96,51	14%	28,00%	50,00%	120,64%	120,00%	Hijau
8b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	132,23	14%	28,00%	50,00%	132,23%	120,00%	Hijau

<b>Stakeholder</b>	<b>(30%)</b>	<b>32,64%</b>
<b>Customer</b>	<b>(20%)</b>	<b>24,00%</b>
<b>Internal Process</b>	<b>(25%)</b>	<b>30,00%</b>
<b>Learning &amp; Growth</b>	<b>(25%)</b>	<b>29,79%</b>
<b>N K O</b>		<b>116,43%</b>

Dalam kontrak kinerja tersebut di atas berisi Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKU Tahun 2025 dan realisasi capaian IKU Tahun 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah turunan dari SS, yang merupakan indikator tercapai/ tidaknya SS tersebut. Pencapaian realisasi IKU dengan status hijau atau  $\geq 100\%$  dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) mengindikasikan keberhasilan pencapaian suatu Sasaran Strategis.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2025, KPKNL Malang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

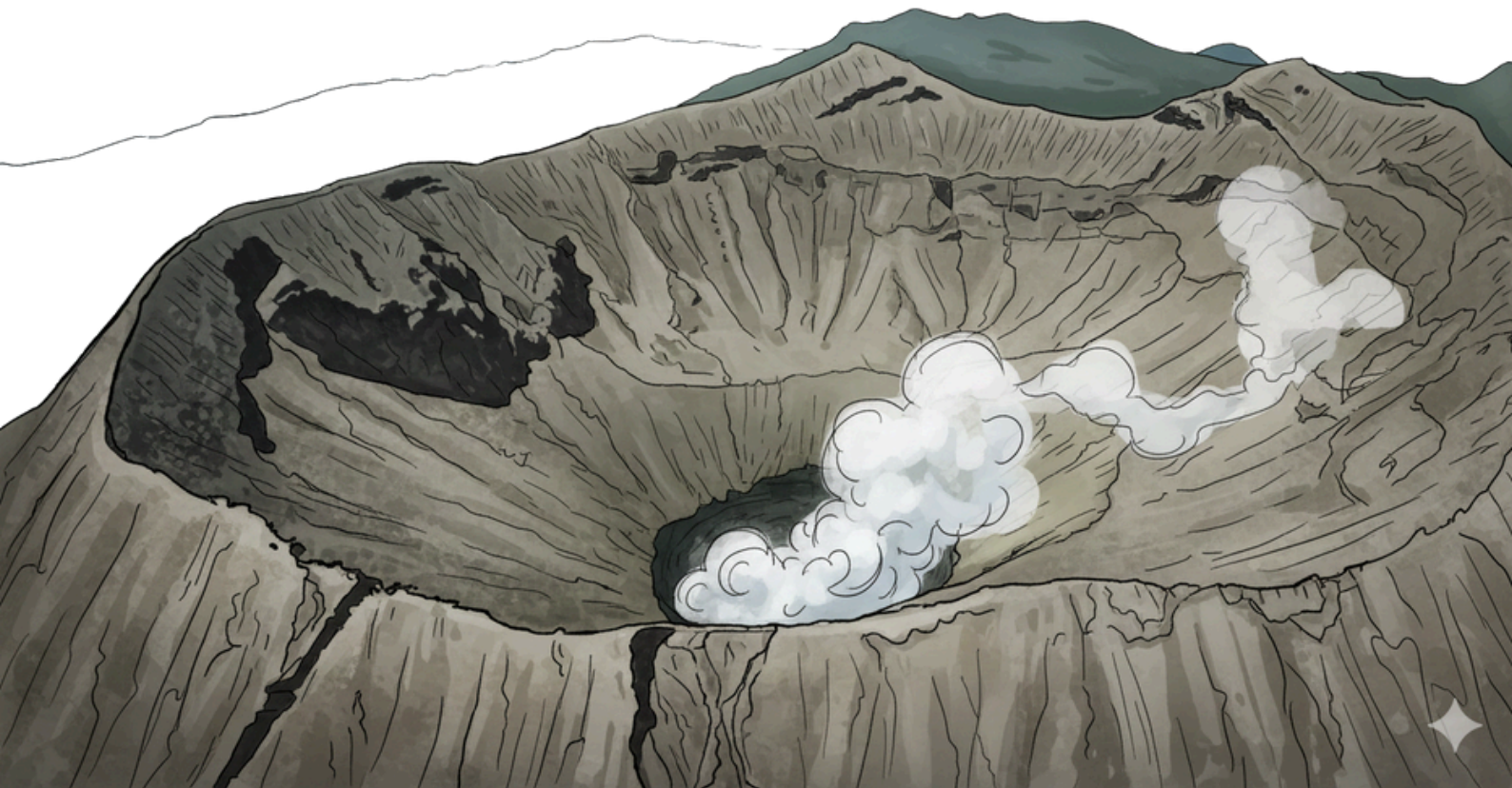
1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Evaluasi dan Analisis Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Penghargaan dan Inovasi

Bentuk tubuh Gunung Bromo terhubung antara lembah dan ngarai dengan Kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi. Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah  $\approx$  800 meter (utara-selatan) dan  $\approx$  600 meter (timur-barat). Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Gunung tersebut memiliki karakteristik atau model erupsi kecil. Jika terjadi letusan, material yang dimuntahkan Bromo berupa pasir dan abu dengan kisaran radius 6 sampai 10 kilome



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah perwujudan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan dan sasaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, capaian kinerja, beserta analisisnya.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Ikhtisar capaian kinerja organisasi terdapat dalam IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL MALANG

TAHUN 2025

#### NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL MALANG PERIODE s.d. BULAN DESEMBER TAHUN 2025

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100	105,29	19%	33,00%	57,58%	105,29%	105,29%	Hijau
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	47.203.500.000,00	53.597.985.388,00	14%	33,00%	42,42%	113,55%	113,55%	Hijau
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	P/M	100,00%	122,22%	14%	42,00%	33,33%	122,22%	120,00%	Hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	380.000.000.000,00	Rp505.060.550.161,00	14%	42,00%	33,33%	132,91%	120,00%	Hijau
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	2.642.557.000,00	Rp7.282.183.937,00	14%	42,00%	33,33%	275,57%	120,00%	Hijau
3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	74	98,96	14%	28,00%	50,00%	133,73%	120,00%	Hijau
3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	P/M	77	96,20	14%	28,00%	50,00%	124,94%	120,00%	Hijau
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/M	100,00%	125,00%	14%	28,00%	50,00%	125,00%	120,00%	Hijau
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	P/M	100,00%	123,99%	14%	28,00%	50,00%	123,99%	120,00%	Hijau
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	37,70	48,90	14%	42,00%	33,33%	129,71%	120,00%	Hijau
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	P/M	70%	107,00%	14%	42,00%	33,33%	152,86%	120,00%	Hijau
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80,00%	120,00%	14%	42,00%	33,33%	150,00%	120,00%	Hijau
6a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	120,00	14%	42,00%	33,33%	120,00%	120,00%	Hijau
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	P/M	100	120,00	14%	42,00%	33,33%	120,00%	120,00%	Hijau
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	80,00%	98,91%	14%	42,00%	33,33%	123,64%	120,00%	Hijau
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	P/M	100	115,00	14%	28,00%	50,00%	115,00%	115,00%	Hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	110,00	14%	28,00%	50,00%	137,50%	120,00%	Hijau
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	80	96,51	14%	28,00%	50,00%	120,64%	120,00%	Hijau
8b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	132,23	14%	28,00%	50,00%	132,23%	120,00%	Hijau

Stakeholder	(30%)	32,64%
Customer	(20%)	24,00%
Internal Process	(25%)	30,00%
Learning & Growth	(25%)	29,79%
<b>N K O</b>		<b>116,43%</b>

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Terdapat 19 (Sembilan belas) jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2025 sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. Semua Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2025 telah memenuhi target dengan status HIJAU atau tingkat

pencapaian target  $\geq 100\%$ .

Berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis (SS) 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya

1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya				
1a-CP	P/L	Indeks Integritas	MAX/TLK	100
TARGET/REALISASI			100	100,00
INDEKS CAPAIAN IKU				100,00%
1b-CP	P/M	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK	Rp47.203.500.000,00
a.		PNBP Pengelolaan BMN	Rp28.550.000.000,00	Rp34.378.498.297,00
b.		PNBP Piutang Negara	Rp7.500.000,00	Rp38.385.218,00
c.		PNBP Lelang	Rp18.646.000.000,00	Rp19.181.101.873,00
JUMLAH REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG			Rp47.203.500.000,00	Rp53.597.985.388,00
CAPAIAN IKU				113,55%
INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN				113,55%

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks Integritas**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100	105,29	19%	33,00%	57,58%	105,29%	105,29%	Hijau

Nilai Persentase Indeks Integritas Organisasi pada tahun 2025 adalah 105,29 dari target yang ditetapkan sebesar 100, sehingga capaiannya sebesar 105,29% dengan status capaian **HIJAU**.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target antara lain:

- Menyampaikan Matriks Action Plan Hasil SPI 2024;
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan : Sosialisasi Anti Korupsi;
- Menyampaikan Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal;
- Melaksanakan tindak lanjut matriks Action Plan Hasil SPI 2024.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	47.203.500.000,00	53.597.985.388,00	14%	33,00%	42,42%	113,55%	113,55%	Hijau

Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2025 adalah sebesar 113,55% dari target yang ditetapkan, sehingga capaiannya sebesar 113,55% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku;
- Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online;
- Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang;
- Melaksanakan sosialisasi terkait permohonan lelang sukarela dan lelang rampasan Kejaksaan;
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Kerja terkait PNPB.

## 2. Sasaran Strategis (SS) 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

2		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
2a-CP	P/M	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	MAX/TLK	100,00%	
CAPAIAN IKU				122,22%	
INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN				122,22%	
2b-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK	Rp380.000.000.000,00	
a.		Pokok Lelang Kelas I	Rp259.374.000.000	Rp384.730.207.861,00	
b.		Pokok Lelang Pegadaian	Rp120.626.000.000	Rp120.330.342.300,00	
c.		Pokok Lelang PL Kelas II	Rp0	Rp0,00	
TARGET / REALISASI POKOK LELANG			Rp380.000.000.000	Rp505.060.550.161,00	
CAPAIAN IKU				132,91%	
INDEKS CAPAIAN TAHUNAN				132,91%	
2c-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK	Rp2.642.557.000,00	
TARGET / REALISASI			Rp2.642.557.000,00	Rp7.282.183.937,00	
CAPAIAN IKU				275,57%	
INDEKS CAPAIAN TAHUNAN				275,57%	

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	P/M	100,00%	122,22%	14%	42,00%	33,33%	122,22%	120,00%	Hijau

Persentase Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara tercapai sebesar 122.22% dari target yang ditetapkan 100,00% sehingga capaiannya sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Hal-hal yang mendukung capaian ini tentunya tidak lepas dari penerapan strategi, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat dan Kanwil DJKN terkait upload data target pengganti.

#### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Presentase Realisasi Pokok Lelang

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	380.000.000.000,00	Rp505.060.550.161,00	14%	42,00%	33,33%	132,91%	120,00%	Hijau

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2025 yakni sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku;
- Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online;
- Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang;
- Melaksanakan sosialisasi terkait permohonan lelang sukarela dan lelang rampasan Kejaksaan;
- Berkoordinasi dengan pihak internal Kementerian Keuangan dan Perbankan untuk pelaksanaan Lelang Serentak tematik.

#### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 : Presentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	2.642.557.000,00	Rp7.282.183.937,00	14%	42,00%	33,33%	275,57%	120,00%	Hijau

Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2025 yakni sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Melakukan penggalian potensi ke beberapa debitur dengan tinjauan lapangan;
- Melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kemampuan debitur dan melakukan pendekatan sebagai langkah supaya debitur mau melakukan pelunasan dan atau angsuran.

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3: Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

3	Pelayanan Kekayan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa				
	3a-CP	P/M	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	MAX/TLK	74
	TARGET / REALISASI			74	98,96
	INDEKS CAPAIAN IKU				133,73%
	3b-N	P/M	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	MAX/TLK	77
	TARGET / REALISASI			77	96,20
	INDEKS CAPAIAN IKU				124,94%

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

#### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	74	98,96	14%	28,00%	50,00%	133,73%	120,00%	Hijau

Realisasi Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2025 yakni sebesar 98,96 dari target yang ditetapkan sebesar 74, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Melakukan Edukom kepada stakeholders yang berkunjung ke KPKNL Malang secara langsung tatap muka terkait prosedur layanan;
- Melakukan Edukom dengan kanal layanan KPKNL Malang, baik melalui Web, media sosial, maupun telepon dan WA;
- Melaksanakan Edukom dengan mengadakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan.

#### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	P/M	77	96,20	14%	28,00%	50,00%	124,94%	120,00%	Hijau

Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2025 yakni sebesar 96,20 dari target yang ditetapkan sebesar 77, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

#### 4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif

4 Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif				
4a-CP	P/M	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	MAX/TLK	100%
a.		K1	9	60
b.		K2	1	1
c.		K3	723	721
d.		K4	3	138
TARGET / REALISASI			736	920
CAPAIAN IKU				125,00%
INDEKS CAPAIAN IKU				125,00%
4b-CP	P/M	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	MAX/TLK	100%
a.		Jumlah NUP BMN yang dievaluasi dan direkomendasi	434	445
b.		Jumlah NUP BMN yang Evaluasi Kinerja ditindaklanjuti oleh	22	32
CAPAIAN IKU				123,99%
INDEKS CAPAIAN IKU				123,99%
INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN				123,99%

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Penerapan Tatakelola Aset yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

#### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Presentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/M	100,00%	125,00%	14%	28,00%	50,00%	125,00%	120,00%	Hijau

Realisasi Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan pada tahun 2025 yakni sebesar 125,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Telah dilakukan penyampaian surat kepada satker pemilik objek target agar segera melakukan tindak lanjut dan memetakan permasalahan atas objek sertipikasi.
- b. Telah dilakukan rapat Monev Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah baik secara daring" & " dengan melibatkan KI dan HI.
- c. Memetakan Objek Satker yang Clean&Clear menurut satker dan Kantah, serta memastikan terdapatnya dana pendampingan guna menyelesaikan sertipikasi 2025
- d. Telah mengajukan permohonan bidang kepada tiap-tiap Kantor Pertanahan" & " di wilayah kerja KPKNL Malang untuk dimasukkan dalam SK Penetapan Lokasi
- e. Mengajukan usulan Penetapan Lokasi kepada Kantor Pertanahan setempat terutama untuk Objek yang sudah dipastikan Clean&Clear dan terdapat anggaran pendampingan dari pihak Satkern" & "ya.
- f. Koordinasi dengan satker untuk mencoba pendekatan menggunakan notaris dalam pembuatan akta pelepasan.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 : Presentase Evaluasi Kinerja BMN**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	P/M	100,00%	123,99%	14%	28,00%	50,00%	123,99%	120,00%	Hijau

Realisasi Persentase Evaluasi Kinerja BMN pada tahun 2025 yakni sebesar 123,99% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi atas Evaluasi Kinerja Aset di SIMAN V2 dilakukan melalui telpon dan whatsapp maupun secara langsung bersamaan saat dilakukan survey lapangan kepada beberapa satker yang menjadi target

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif				
5a-CP	P/M	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK	37,7	
SPPNL dan SPPNS			37,7	5	
PSBDT dan SPPPN				31	
PPNTO dan PPDTO				0	
CAPAIAN IKU				40,10	
INDEKS CAPAIAN IKU				106,37%	
INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN				95,49%	
5b-CP	P/M	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	MAX/TLK	70,00%	
TARGET/REALISASI			70%	107,00%	
INDEKS CAPAIAN IKU				152,86%	
5c-CP	P/M	Persentase Produktivitas Lelang	MAX/TLK	80%	
TARGET / REALISASI			80%	120,00%	
CAPAIAN IKU				150,00%	
INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN				150,00%	

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 : Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	37,70	48,90	14%	42,00%	33,33%	129,71%	120,00%	40%	Hijau

Realisasi Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada tahun 2025 yakni sebesar 48,90 dari target yang ditetapkan sebesar 37,70, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah melakukan penggalian dan pendekatan ke debitur yang sekiranya bisa di prospek untuk pelunasan

### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 : Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	P/M	70%	107,00%	14%	42,00%	33,33%	152,86%	120,00%	40%	Hijau

Realisasi Tingkat Kualitas Layanan Penilaian pada tahun 2025 yakni sebesar 107,00% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan prioritas pemilihan permohonan penilaian terutama terkait pengelolaan BMN terlebih dahulu dan melakukan perencanaan yang matang untuk pelaksanaan penilaian.

### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 : Prosentase Produktivitas Lelang

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80,00%	120,00%	14%	42,00%	33,33%	150,00%	120,00%	40%	Hijau

Realisasi Prosentase Produktivitas Lelang pada tahun 2025 yakni sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku.
- Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online
- Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang.
- Melaksanakan sosialisasi terkait permohonan lelang sukarela dan lelang rampasan kejaksaan.
- Realisasi capaian tingkat produktifitas lelang bulan Juni 2025 yaitu sebesar 112,32%

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif

6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif				
6a-CP	P/M	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	MAX/TLK	100,00	
TARGET / REALISASI			100,00	120	
INDEKS CAPAIAN IKU				120,00%	
6b-N	P/M	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	MAX/TLK	100,00	
TARGET / REALISASI			100,00	120,00%	
INDEKS CAPAIAN IKU				120,00%	
6c-N	P/M	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	MAX/TLK	80,00	
TARGET / REALISASI			80,00	101,82	
CAPAIAN IKU				127,28%	
INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN				127,28%	

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
6a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	120,00	14%	42,00%	33,33%	120,00%	120,00%	40%	Hijau

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 yakni sebesar 120,00 dari target yang ditetapkan sebesar 100 sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Rutin meminta data capaian output dan rencana penarikan dana pada masing-masing seksi setiap bulannya untuk diinput di Aplikasi Sakti Modul Capaian Output;
- Mengoptimalkan pencapaian 8 Indikator Reformulasi IKPA sesuai dengan target yang ditetapkan;
- Sinergi dari Pimpinan dan seluruh pihak di KPKNL Malang untuk optimalisasi nilai kinerja anggaran pada IKPA.
- Realisasi capaian Bulan Desember 2025 yaitu sebesar 120 dengan persentase IKPA 100% dan Nilai IKPA 100%

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	P/M	100	120,00	14%	42,00%	33,33%	120,00%	120,00%	40%	Hijau

Realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2025 yakni sebesar 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 15 : Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	80,00%	98,91%	14%	42,00%	33,33%	123,64%	120,00%	40%	Hijau

Realisasi Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2025 yakni sebesar 98,91% dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan Kantor Pusat DJKN mengenai teknis pengisian capaian serta melakukan input seluruh realisasi anggaran ke dalam ekosistem pengadaan guna mencapai target IKU

- a. Mengingatkan pegawai secara berkala melalui WAG Kantor dan menyediakan tautan pengisian diklat secara mandiri sebagai alat monitoring Diklat Pegawai KPKNL Malang.
- b. Menyediakan sarana pelaporan jam diklat yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai
- c. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental sebanyak 1 kali setiap Triwulan.
- d. Melaksanakan Kegiatan Sinergi Antar Generasi pada Triwulan II dan III, sesuai pedoman dari biro SDM.
- e. Menyetujui/mengajukan usulan diklat pegawai melalui aplikasi diklat.
- f. Menerbitkan surat tugas atas pegawai yang telah dipanggil untuk melaksanakan diklat.
- g. Dari total 45 pegawai KPKNL Malang, sebanyak 46 pegawai sudah memenuhi 25 jamlat.
- h. Total 20 pegawai telah mengikuti diklat dari total 20 panggilan diklat.

## 7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

7 Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif				
7a-CP	P/M	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	MAX/TLK	100
TARGET / REALISASI			100	109,53
INDEKS CAPAIAN IKU				109,53%
7b-N	P/M	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MAX/TLK	80
TARGET / REALISASI			80	115,00
INDEKS CAPAIAN IKU				143,75%

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	P/M	100	115,00	14%	28,00%	50,00%	115,00%	115,00%	58%	Hijau

Realisasi Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada tahun 2025 yakni sebesar 115 dari target yang ditetapkan sebesar 100, sehingga capaiannya adalah sebesar 115,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan terkait jadwal kehadiran agenda sidang, dengan menekankan kehadiran KPKNL terbatas untuk agenda yang sangat penting, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

### Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	110,00	14%	28,00%	50,00%	137,50%	120,00%	60%	Hijau

Realisasi Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada tahun 2025 yakni sebesar 110 dari target yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan tindak lanjut atas permohonan PPID yang masuk pada kesempatan pertama.

**8. Sasaran Strategis (SS) 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif**

<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif</b>				
	<b>8A-N</b>	<b>P/M</b>	<b>Indeks Kualitas manajemen Kinerja dan Risiko</b>	<b>MAX/TLK</b>	<b>100</b>
	<b>TARGET / REALISASI</b>			<b>80</b>	<b>96,98</b>
	<b>INDEKS CAPAIAN IKU</b>				<b>100,00%</b>
	<b>8b-N</b>	<b>P/M</b>	<b>Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-</b>	<b>MAX/TLK</b>	<b>100</b>
	<b>TARGET / REALISASI</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>INDEKS CAPAIAN IKU</b>				<b>100,00%</b>

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif pada tahun 2025 telah mencapai hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

**Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	80	96,51	14%	28,00%	50,00%	120,64%	120,00%	60%	Hijau

Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun 2025 yakni sebesar 96,51 dari target yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah menyusun dokumen terkait Manajemen Kinerja Organisasi, Manajemen Risiko Organisasi dan Manajemen Kinerja pegawai periode Triwulan IV 2025, kemudian menyampaikan dokumen tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

**Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 : Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot SS	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Hit. NKO	Keterangan
8b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	132,23	14%	28,00%	50,00%	132,23%	120,00%	60%	Hijau

Realisasi Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025 yakni sebesar 132,23 dari target yang ditetapkan sebesar 100, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Memenuhi dokumen monev ZI WBK pada triwulan I berupa 6 (enam) dokumen yang terdiri dari :
- b. Menyusun SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM
- c. Menyusun Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM
- d. Melakukan dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monev Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala (Undangan, notula, daftar hadir) Dokumen Monev I dan Monev II serta Edukasi ke Kanwil DJKN Jawa Timur.

## C. Realisasi Anggaran

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
Satuan Kerja : 537810 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>3,187,198,000</b>	<b>0</b>	<b>2,922,141,613</b>	<b>261,238,599</b>	<b>3,183,380,212</b>	<b>99.88 %</b>	<b>3,817,788</b>
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	645,585,000	0	572,571,029	71,394,034	643,965,063	99.75 %	1,619,937
WA Program Dukungan Manajemen	2,541,613,000	0	2,349,570,584	189,844,565	2,539,415,149	99.91 %	2,197,851

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

D. Realisasi PNB

REALISASI PNB KPNL MALANG				
TAHUN 2025				
IKU	V/C	Uraian IKU	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1b-CP	P/M	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK	Rp47.203.500.000,00
a.		PNBP Pengelolaan BMN	Rp28.550.000.000,00	Rp34.378.498.297,00
b.		PNBP Piutang Negara	Rp7.500.000,00	Rp38.385.218,00
c.		PNBP Lelang	Rp18.646.000.000,00	Rp19.181.101.873,00
<b>JUMLAH REALISASI PENERIMAAN</b>			<b>Rp47.203.500.000,00</b>	<b>Rp53.597.985.388,00</b>
<b>CAPAIAN IKU</b>				<b>113,55%</b>
<b>INDEKS CAPAIAN IKU TAHUNAN</b>				<b>113,55%</b>

## E. Penghargaan dan Inovasi

### i. Penghargaan



## ii. Inovasi

### Keunggulan dan Inovasi KPKNL Malang

## OSKAB NEWS

### Obrolan Seputar Kekayaan Negara Bermanfaat

KPKNL Malang menghadirkan inovasi layanan digital OSKAB NEWS yang telah diimplementasikan melalui program penyebaran informasi tematik dan serial seputar kekayaan negara yang bermanfaat bagi Satuan Kerja melalui WhatsApp Group.

Layanan ini dilaksanakan guna memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas penyampaian informasi.

- Seri #5 Panduan Permohonan Sewa BMN (20 Agustus).
- Seri #6 Standar Pelayanan Publik (22 Agustus).
- Seri #7 Seputar BMN SBSN (25 Agustus).



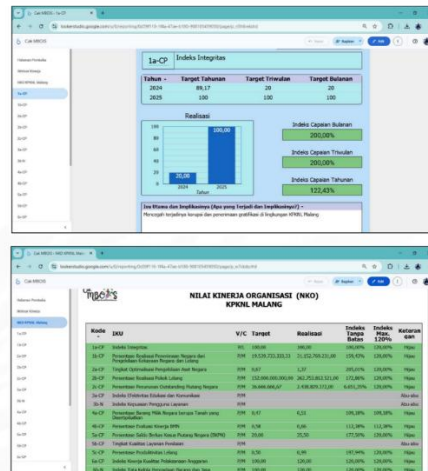
### Keunggulan dan Inovasi KPKNL Malang

## CAK MBOIS

### Capaian Kinerja MBOIS

CAK MBOIS (Capaian Kinerja MBOIS) adalah aplikasi pemantauan kinerja real time di KPKNL Malang yang menampilkan indikator kinerja utama (IKU) dari Kepala KPKNL hingga seksi teknis, subbagian umum, dan pejabat fungsional. Setiap pegawai memperbarui capaian secara mandiri, sehingga seluruh hasil langsung terintegrasi menjadi Nilai Kinerja Organisasi.

Aplikasi ini berfungsi sebagai database untuk rapat DKO triwulanan, monitoring dan evaluasi bulanan, serta bahan *one on one meeting* dengan Kepala KPKNL. Dampaknya, pegawai lebih mudah memonitor dan mengevaluasi kinerja, dan tim KI dapat memantau capaian melalui satu dashboard, serta penyusunan laporan menjadi lebih efisien.



Keunggulan dan Inovasi KPKNL Malang

## UPAYA PERCEPATAN Penyelesaian Antrian Lelang

Tim Percepatan KPKNL Malang, yang baru dimulai bulan Agustus 2025, berhasil menuntaskan seluruh antrian permohonan lelang dalam dua periode percepatan.

- Pada periode pertama, **1.168** antrian (data 21 Juli 2025) berhasil diselesaikan menjadi **0** antrian dalam **28 hari** (posisi 18 Agustus 2025), jauh lebih cepat dari target 3 bulan.
- Pada periode kedua, **422** antrian (data 6 Oktober 2025) juga diselesaikan menjadi **0** antrian hanya dalam **6 hari** (posisi 12 Oktober 2025).

Capaian ini menunjukkan komitmen dan efektivitas KPKNL Malang dalam menuntaskan permasalahan antrian lelang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.



	Antrian Berkas Permohonan Lelang Periode I			Antrian Berkas Permohonan Lelang Periode II		
	2 Juli 2025	21 Juli – 18 Agustus 2025	18 Agustus 2025	3 Oktober 2025	6-12 Oktober 2025	12 Oktober 2025
V1	519	0				
V2	811	695	0	340	340	0
Berkas masuk		216				
Berkas dikembalikan dan sudah diperbaiki Pemohon		257	0	0	82	0
<b>Total</b>	<b>1.330</b>	<b>1.168</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>422</b>	<b>0</b>

Keunggulan dan Inovasi KPKNL Malang

## UPAYA PERCEPATAN Layanan Pembayaran BPHTB

KPKNL Malang menggelar Rakor Peningkatan PAD dan Optimalisasi Aset Daerah di Aula Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu bersama perwakilan BPKAD se-wilayah kerja KPKNL Malang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan, penghapusan lewat lelang, serta peningkatan PAD dari BPHTB. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan rencana aksi terukur agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomi. Rakor ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut.



# 4

## PENUTUP

Di sisi selatan Bromo terdapat area savana hijau, sangat kontras dengan lanskap tandus di sekitarnya. Bukit-bukit bergelombang yang tertutup rumput hijau mendapat julukan "Bukit Teletubbies" karena mirip dengan dunia fiksi dari seri televisi anak-anak, Teletubbies. Lokasi ini sempurna untuk jalan santai dan sesi foto.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN c.q. KPKNL Malang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan KPKNL Malang tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian

**HIJAU** yang terdiri dari 19 IKU sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Keterangan
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100	105,29	Hijau
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	47.203.500.000,00	53.597.985.388,00	Hijau
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	P/M	100,00%	122,22%	Hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	380.000.000.000,00	Rp505.060.550.161,00	Hijau
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	2.642.557.000,00	Rp7.282.183.937,00	Hijau
3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	P/M	74	98,96	Hijau
3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	P/M	77	96,20	Hijau
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	P/M	100,00%	125,00%	Hijau
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	P/M	100,00%	123,99%	Hijau
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	37,70	48,90	Hijau
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	P/M	70%	107,00%	Hijau
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	P/M	80,00%	120,00%	Hijau
6a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	P/M	100	120,00	Hijau
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	P/M	100	120,00	Hijau
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	80,00%	98,91%	Hijau
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	P/M	100	115,00	Hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	110,00	Hijau
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	80	96,51	Hijau
8b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	132,23	Hijau

## **A. Permasalahan dan Kendala**

Secara umum pencapaian tahun 2025 sudah di atas target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Malang, dengan nilai kinerja organisasi sebesar 116,43% dengan capaian HIJAU terdiri dari 8 Sasaran Strategis dan 19 IKU. Meskipun keseluruhan IKU yang berjumlah 19 sudah memperoleh capaian hijau masih terdapat beberapa permasalahan yang mungkin mempengaruhi capaian IKU tahun berikutnya, antara lain permasalahan terkait IKU Indeks Integritas Organisasi dan IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM.

## **B. Strategi Pemecahan Untuk Tahun 2026**

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang terjadi di tahun 2025 tersebut, maka di tahun 2026 diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari permasalahan dan kendala pada KPKNL Malang tersebut, rencananya akan dilakukan upaya yaitu dengan cara :

- a. Menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas di lingkup KPKNL Malang;
- b. Menambahkan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada *stake holders*;
- c. Menyusun dan mempersiapkan dokumen keberlanjutan WBK dengan lebih baik;
- d. Melanjutkan kegiatan pembangunan ZI WBK/WBBM.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dimaksudkan sebagai arahan untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2025 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dengan visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

# LAMPIRAN



Seruni Point adalah titik pandang matahari terbit yang indah di dekat Gunung Bromo, terletak di Desa Ngadisari, Jawa Timur. Tempat ini menawarkan pemandangan jelas Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru, serta menjadi alternatif yang lebih tenang dibandingkan Penanjakan I yang populer. Mudah diakses dengan jeep dan sedikit berjalan kaki, Seruni Point sangat cocok bagi wisatawan yang mencari tempat tenang tetapi menakjubkan untuk menikmati matahari terbit khas Bromo.



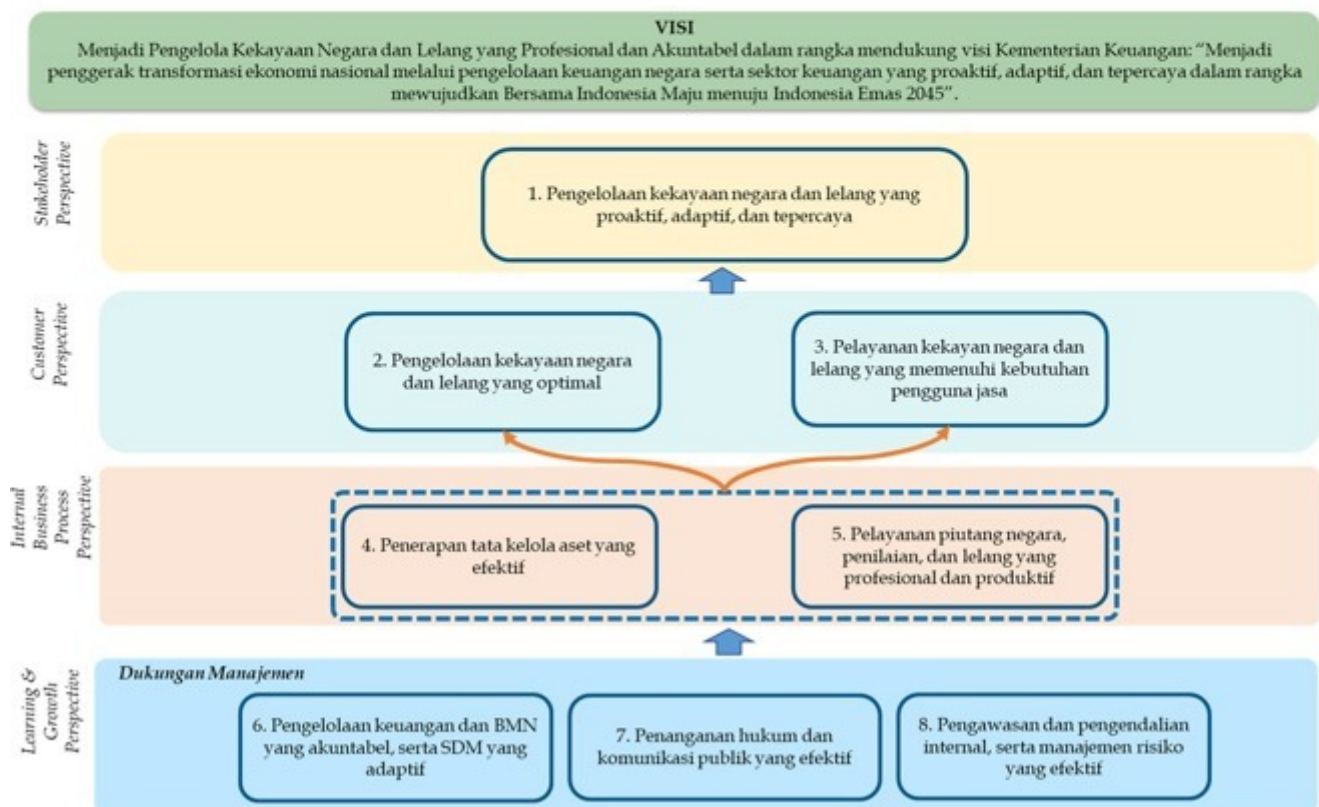
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-03/WKN.10/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**MALANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
MALANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp47,19 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp380 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp70 Juta)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp781,566,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp51,387,000
2. Pengelolaan Aset Rp730,179,000

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp8,968,573,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp80,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp8,820,723,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp46,650,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp21,200,000

Kab. Malang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Timur



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dudung Rudi Hendratna

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ridho Wahyono



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**MALANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp47,19 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp380 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp70 Juta)
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kab. Malang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ridho Wahyono



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kab. Malang, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ridho Wahyono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ridho Wahyono		NAMA	Dudung Rudi Hendratna
NIP	19710119 199803 1 001		NIP	19700622 199103 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp47,19 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp380 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp70 Juta)	Penerima Layanan
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	Efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kab. Malang, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ridho Wahyono  
19710119 199803 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	43 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp47,19 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp380 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp70 Juta)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Kab. Malang, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ridho Wahyono  
19710119 199803 1 001





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-03a/WKN.10/2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
MALANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
MALANG  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp47,19 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2.642.557.000)
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp380 M)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (37,70)
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025*



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp781,566,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp51,387,000

2. Pengelolaan Aset Rp730,179,000

Program:

Program Dukungan Manajemen Rp8,968,573,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp80,000,000

2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp8,820,723,000

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp46,650,000

4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp21,200,000

Malang, 18 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Timur



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dudung Rudi Hendratna

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kurniawan Catur Andrianto



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**MALANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp47,19 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2.642.557.000)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp380 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa</b>							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (37,70)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	kompetensi pegawai							
6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Malang, 18 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kurniawan Catur Andrianto



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Malang, 18 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kurniawan Catur Andrianto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kurniawan Catur Andrianto		NAMA	Dudung Rudi Hendratna
NIP	19730129 199903 1 001		NIP	19700622 199103 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp47,19 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2.642.557.000)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp380 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025*



	Efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (37,70)	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Malang, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Kurniawan Catur Andrianto  
19730129 199903 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	45 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp47,19 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2.642.557.000)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp380 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (37,70)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

## KONSEKUENSI



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Malang, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Kurniawan Catur Andrianto  
19730129 199903 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002



## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III KPKNL Malang  
Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya	1a-CP Indeks Integritas	100	105,29	105,29%
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	47.203.500.000,00	53.597.985.388,00	113,55%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	122,22%	120,00%
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	380.000.000.000,00	505.060.550.161,00	120,00%
		2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	2.642.557.000,00	7.282.183.937,00	120,00%
3.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74	98,96	120,00%
		3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	96,20%	120,00%
4.	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	125%	120,00%

		4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	123,99%	120,00%
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	37,70%	48,90%	120,00%
		5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70	107	120,00%
		5c-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%	120,00%	120,00%
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120,00%
		6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100	120	120,00%
		6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	98,91%	120,00%
7.	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100	115	115%
		7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	110	120,00%
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	96,51	120,00%
		8b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	132,23	120,00%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025 : Rp3.187.198.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp3.183.380.212,- (99,88%)